

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan lima bagian. Bagian yang pertama ialah kajian komparatif yang akan membahas secara kualitatif konsep KPMM dan komponennya menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan menurut PBI No. 8/7/PBI 2006. Bagian kedua ialah melakukan perhitungan KPMM yang dimulai dengan menghitung permodalan, ATMR dan kemudian KPMM. Perhitungan ATMR menurut PBI No. 5/2/PBI/2003 untuk Bank Syariah Mega Indonesia akan menggunakan data triwulanan mulai dari triwulan I tahun 2006 sampai dengan triwulan IV tahun 2007. Perhitungan ATMR menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 untuk Bank Jasa Jakarta akan menggunakan data triwulanan mulai dari triwulan I tahun 2006 sampai dengan triwulan IV tahun 2007. Bagian ketiga, setelah mendapatkan hasil perhitungan KPMM kedua bank kemudian dilakukan perbandingan dan melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak. Bagian keempat ialah memberikan solusi untuk meningkatkan rasio KPMM. Bagian kelima melakukan analisis apakah PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan nilai-nilai keadilan dalam perhitungan KPMM-nya terhadap Bank Mega Syariah Indonesia.

4.1 Kajian Komparatif

Pada subbab ini akan dilakukan pembahasan kualitatif mengikuti pola rumus KPMM yang terdiri dari unsur pembilang dan pembagi. Unsur Pembilang merupakan permodalan yang terdiri dari modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan. Unsur pembagi merupakan ATMR yang merupakan ATMR pembiayaan/kredit.

4.1.1 Permodalan

Unsur permodalan terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Tabel berikut menyajikan perbandingan komponen modal inti antara PBI No. 5/12/PBI/2003 yang operasionalnya mengacu kepada SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14

Desember 2001 dan PBI No. 8/7/PBI2006 yang operasionalnya mengacu kepada SE BI No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006.

Tabel 4.1 Perbandingan Komponen Modal Inti

PBI No. 5/12/PBI 2003	PBI No. 8/7/PBI/2006
A. Modal Inti	A. Modal Inti
1. Modal Disetor	1 Modal Disetor
2. Cadangan Tambahan Modal	2 Cadangan Tambahan Modal
a. Agio Saham	a. Agio Saham
b. Disagio (-/-)	b. Disagio (-/-)
c. Modal Sumbangan	c. Modal Sumbangan
d. Cadangan Umum dan Tujuan	d. Cadangan Umum dan Tujuan
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak
f. Rugi tahun-tahun lalu	f. Rugi tahun-tahun lalu
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)	g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)
h. Rugi tahun berjalan (-/-)	h. Rugi tahun berjalan (-/-)
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri	i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri
1) Selisih lebih	1) Selisih lebih
2) Selisih kurang	2) Selisih kurang
j. Dana Setoran Modal	j. Dana Setoran Modal
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)
3. Goodwill (-/-)	3. <i>Goodwill</i> (-/-)

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan komponen maupun tata cara perhitungan modal inti antara PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006. Sehingga nilai akhir perhitungan dengan kedua PBI tersebut akan menghasilkan nominal yang sama. Tabel berikut akan melihat perbandingan modal pelengkap diantara kedua PBI tersebut.

Tabel 4.2 Perbandingan Komponen Modal Pelengkap

PBI No. 5/12/PBI 2003	PBI No. 8/7/PBI/2006
B. Modal Pelengkap (Maks. 100% dari Modal Inti)	B. Modal Pelengkap (Maks. 100% dari Modal Inti)
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	1 Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (Maks. 1,25% dari ATMR)	2 Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (Maks. 1,25% dari ATMR)
3. Modal Pinjaman	3 Modal Pinjaman
4. Pinjaman Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)	4 Pinjaman Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)
5. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)	5 Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan komponen dan tata cara perhitungan modal pelengkap, sehingga dapat dipastikan tidak ada perbedaan hasil perhitungan modal pelengkap menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 ataupun PBI No. 8/7/PBI/2006. Namun, berkaitan dengan poin B.4 untuk PBI. No. 8/7/PBI/2006 disesuaikan agar tidak melanggar prinsip syariah yaitu surat berharga yang diterbitkan merupakan obligasi syariah subordinasi dan

kewajiban kepada bank lain juga termasuk obligasi syariah subordinasi. Untuk poin B.5 dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 yang dimaksud bukan peningkatan harga saham melainkan peningkatan nilai penyertaan.

Secara umum modal inti dan modal pelengkap dilihat dari aspek komponen dan tata cara perhitungan tidak berbeda. Setelah melakukan kajian komparatif permodalan menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006 maka secara kualitatif dapat diketahui tidak ada perbedaan jumlah modal yang akan dihasilkan.

4.1.2 Kententuan Perhitungan ATMR

Pembahasan perhitungan ATMR dibagi dua yaitu bagian aktiva neraca dan bagian rekening administratif, pembahasan dilakukan berdasarkan komponen dan bobot risikonya. Berikut disajikan tabel pembahasan bagian pertama yaitu aktiva neraca untuk komponen dan bobot risiko kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan surat berharga menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006.

Tabel 4.3 Perbandingan Komponen dan Bobot Risiko Kas, Emas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, dan Surat Berharga.

PBI No. 5/12/PBI/2003	Komponen	PBI No. 8/7/PBI/2006
0%	Kas	0%
0%	Emas	0%
0%	Bank Indonesia	0%
20%	Bank Lain	20%
	Surat Berharga	
50%	(a) Diterbitkan/dijamin oleh BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain	20%
100%	Pihak swasta lainnya	

Tabel 4.3 (Lanjutan)

Rating AAA s.d. AA-	20%
Rating A+ s.d. A-	50%
Rating BBB+ s.d. BBB-	100%
Rating BB + s.d. BB-	100%
Rating dibawah B-	150%
<i>Unrated</i>	100%

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa untuk komponen kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain mempunyai bobot risiko yang sama yaitu sebesar 0%, baik menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 maupun menurut PBI No. 8/7/PBI/2006. Untuk komponen surat berharga yang diterbitkan/dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah negara lain menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 mempunyai bobot risiko sebesar 50% sedangkan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya diberikan bobot risiko sebesar 20%. Sedangkan untuk komponen surat berharga yang diterbitkan oleh pihak swasta lainnya dalam PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 100% sedangkan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dibedakan bobot risiko mulai dari 0% sampai dengan 150% sesuai dengan rating yang diperoleh oleh perusahaan pemeringkat yang disetujui oleh BI. Dalam tabel selanjutnya akan disajikan komponen dan bobot risiko dari piutang, pembiayaan/kredit dan tagihan lainnya.

**Tabel 4.4 Perbandingan Komponen dan Bobot Risiko Piutang, Pembiayaan/
Kredit dan Tagihan Lainnya.**

PBI No.		PBI No.
5/12/PBI/2003		8/7/PBI/2006
Bobot Risiko	Komponen	Bobot Risiko
Piutang		
50%	(a) Diterbitkan/dijamin oleh BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.	20%
100%	(b) Pihak swasta lainnya	
	Rating AAA s.d. AA-	20%
	Rating A+ s.d. A-	50%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	100%
	Rating BB + s.d. BB-	100%
	Rating dibawah B-	150%
	<i>Unrated</i>	100%
50%	Pemilikan Rumah yang dijamin pihak pertama utk dihuni.	35%
100%	Piutang Kepada Usaha Kecil.	85%
100%	Piutang kpd pegawai/pensiunan.	50%
Pembiayaan/Kredit		
50%	(a) Diterbitkan/dijamin oleh BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.	20%
100%	(b) Pihak swasta lainnya	
	Rating AAA s.d. AA-	20%
	Rating A+ s.d. A-	50%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	100%
	Rating BB + s.d. BB-	100%

Tabel 4.4 (Lanjutan)

	Rating dibawah B-	150%
	<i>Unrated</i>	100%
Tagihan Lainnya		
50%	(a) Diterbitkan/dijamin oleh BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.	20%
100%	(b) Pihak swasta lainnya	
	Rating AAA s.d. AA-	20%
	Rating A+ s.d. A-	50%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	100%
	Rating BB + s.d. BB-	100%
	Rating dibawah B-	150%
	<i>Unrated</i>	100%

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa komponen piutang yang diterbitkan/dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain diberikan bobot 50% pada PBI No. 5/12/PBI/2003 sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 diberikan bobot risiko sebesar 20%. Piutang kepada pihak swasta lainnya pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 100% sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko disesuaikan dengan rating yang dimiliki mulai dari 0% samapai dengan 150%. Piutang pemilikan rumah yang dijamin oleh pihak pertama dengan tujuan untuk dihuni diberikan bobot risiko sebesar 35% pada PBI No. 8/7PBI/2006 sedangkan KPR yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 50%. Piutang kepada usaha kecil diberikan bobot risiko sebesar 85% pada PBI No. 8/7/PBI/2006 sedangkan kredit yang diberikan kepada usaha kecil pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 100% karena masuk katagori pihak swasta lainnya. Piutang kepada pegawai atau pensiunan diberikan bobot risiko sebesar 50% pada PBI No. 8/7/PBI/2006 sedangkan kredit yang diberikan kepada pegawai atau pensiunan pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 100% karena masuk katagori pihak swasta lainnya.

Untuk pembiayaan/kredit yang diberikan atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain diberikan bobot 50% pada PBI No. 5/12/PBI/2003 sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 diberikan bobot risiko sebesar 20%. Piutang kepada pihak swasta lainnya pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 100% sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko disesuaikan dengan rating yang dimiliki mulai dari 0% sampai dengan 150%. Begitu pula dengan tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain diberikan bobot 50% pada PBI No. 5/12/PBI/2003 sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 diberikan bobot risiko sebesar 20%. Piutang kepada pihak swasta lainnya pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 100% sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko disesuaikan dengan rating yang dimiliki mulai dari 0% sampai dengan 150%.

Berbeda dengan komponen penyertaan pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko 100% sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 penyertaan dana yang berasal dari sumber dana PLS diberikan bobot risiko sebesar 1% dan penyaluran dana PLS yang sumber dananya berasal dari wadiah, modal sendiri, *qardh*, dan *mudharabah mutlaqah* diberikan bobot risiko sebesar 150%.

Pada tabel berikut akan dilanjutkan pembahasan pada bagian kedua yaitu komponen dan bobot risiko yang ada di rekening administratif.

Tabel 4.5 Perbandingan Komponen dan Bobot Risiko Fasilitas Pembiayaan yang belum digunakan

PBI No.		PBI No.
5/12/PBI/2003		8/7/PBI/2006
Bobot Risiko	Komponen	Bobot Risiko
Fasilitas Pembiayaan/Kredit		
25%	(a) Diterbitkan/dijamin oleh BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain	10%
50%	(b) Pihak-pihak lainnya Rating AAA s.d. AA-	10%

Tabel 4.5 (Lanjutan)

	Rating A+ s.d. A-	25%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	50%
	Rating BB + s.d. BB-	50%
	Rating dibawah B-	75%
	<i>Unrated</i>	50%
25%	KPR yg dijamin oleh pihak pertama tujuan utk dihuni.	<i>Not stated</i>
<i>Not stated</i>	Usaha Kecil.	42,5%
<i>Not stated</i>	Pegawai/Pensiunan	25%

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa fasilitas pembiayaan/kredit yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan, atau yang dijamin surat berharga yang diterbitkan oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot sebesar 25% sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya diberikan bobot risiko sebesar 10%. Fasilitas pembiayaan/kredit yang diberikan atau dijamin oleh pihak swasta lainnya dalam PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 50% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko diberikan sesuai dengan rating yang dimiliki dimulai dari 10% sampai dengan 75%. Untuk komponen KPR yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni dalam PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 25% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 tidak disebutkan. Dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 fasilitas pembiayaan/kredit untuk usaha kecil diberikan bobot risiko sebesar 42,5% dan untuk pegawai pensiunan diberikan bobot risiko sebesar 25% sedangkan dalam PBI No. 5/12/PBI/2003 tidak disebutkan. Pada tabel berikut disajikan lanjutan pembahasan kualitatif rekening administratif pada komponen garansi/jaminan bank.

Tabel 4.6 Perbandingan Komponen dan Bobot Risiko Garansi/Jaminan Bank

PBI No.		PBI No.
5/12/PBI/2003		8/7/PBI/2006
Bobot Risiko	Komponen	Bobot Risiko
	Dalam Rangka pemberian pembiayaan termasuk standby L/C & risk sharing serta endosemen atau aval atas surat ² berharga yg diberikan atas permintaan:	
25%	(a) BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain	10%
50%	(b) Pihak-pihak lainnya	
	Rating AAA s.d. AA-	10%
	Rating A+ s.d. A-	25%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	50%
	Rating BB + s.d. BB-	50%
	Rating dibawah B-	75%
	<i>Unrated</i>	50%
	Bukan dalam rangka pembiayaan, seperti <i>bid bonds</i> , <i>performance bonds</i> dan <i>advance payments bonds</i> yang diberikan atas permintaan:	
25%	(a) BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain	10%
50%	(b) Pihak-pihak lainnya	
	Rating AAA s.d. AA-	10%
	Rating A+ s.d. A-	25%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	50%
	Rating BB + s.d. BB-	50%

Tabel 4.6 (Lanjutan)

	Rating dibawah B-	75%
	<i>Unrated</i>	50%
L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) yang diberikan atas permintaan:		
10%	(a) BUMN & perusahaan milik pemerintah pusat negara lain	4%
20%	(b) Pihak-pihak lainnya	
	Rating AAA s.d. AA-	4%
	Rating A+ s.d. A-	10%
	Rating BBB+ s.d. BBB-	20%
	Rating BB + s.d. BB-	20%
	Rating dibawah B-	30%
	<i>Unrated</i>	20%

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa komponen garansi/jaminan bank dalam rangka pemberian pembiayaan termasuk *standby* L/C dan *risk sharing* serta endorsemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 25% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 diberikan bobot risiko sebesar 10%. Masih dalam rangka pembiayaan yang diberikan atas permintaan pihak-pihak lainnya pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sama rata sebesar 50% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko diberikan sesuai dengan rating yang dimiliki oleh pihak tersebut, bobot risiko mulai dari 4% sampai dengan 30%. Garansi/jaminan bank bukan dalam rangka pemberian pembiayaan seperti *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance bonds* yang diberikan atas permintaan BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 25% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 diberikan bobot sebesar 10%. Masih dalam komponen

garansi/jaminan bukan dalam rangka pembiayaan yang diberikan atas permintaan pihak-pihak lainnya pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sama rata sebesar 50% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko diberikan sesuai dengan rating yang dimiliki oleh pihak tersebut, bobot risiko mulai dari 10% sampai dengan 75%. Bagian yang terakhir dalam aspek garansi/jaminan bank L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) yang diberikan atas permintaan BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sebesar 10% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 diberikan bobot risiko sebesar 4%. L/C yang masih berlaku yang diberikan atas permintaan pihak-pihak lainnya pada PBI No. 5/12/PBI/2003 diberikan bobot risiko sama rata sebesar 20% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 bobot risiko diberikan sesuai dengan rating yang dimiliki oleh pihak tersebut, bobot risiko yang diberikan mulai dari 4% sampai dengan maksimum 30%.

4.2 Perhitungan KPMM

Pada subbab ini akan dilakukan perhitungan KPMM. Pertama, menghitung faktor pembilang yang terdiri dari unsur permodalan, dan penyertaan. Kedua, menghitung faktor pembagi yang terdiri dari ATMR dengan menyajikan hasil perhitungan ATMR Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta periode triwulanan dengan menggunakan data triwulan I tahun 2006 sampai dengan triwulan IV tahun 2007.

4.2.1 Bank Mega Syariah Indonesia

Pada subbab berikut akan dilakukan perhitungan permodalan, ATMR dan KPMM pada Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).

4.2.1.1 Perhitungan Permodalan

Permodalan Bank Syariah Mega Indonesia menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 telah tersedia. Data tersebut digunakan kembali untuk menghitung modal menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003. Berikut hasil yang didapatkan.

Tabel 4.7 Perhitungan Modal BSMI menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

(dalam jutaan rupiah)

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)				
Modal	Tahun 2006			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	72,387	91,561	136,881	156,856
PBI No. 8/7/PBI/2006	72,387	91,561	136,881	156,856
Modal	Tahun 2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	189,043	199,823	212,133	217,990
PBI No. 8/7/PBI/2006	189,043	199,823	212,133	217,990

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa hasil perhitungan modal menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 dan menurut PBI 8/7/PBI/2006 menghasilkan nilai yang sama.

4.2.1.2 Perhitungan ATMR

ATMR pembiayaan Bank Syariah Mega Indonesia menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 telah tersedia. Data tersebut digunakan kembali untuk menghitung ATMR pembiayaan menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003. Berikut hasil yang didapatkan.

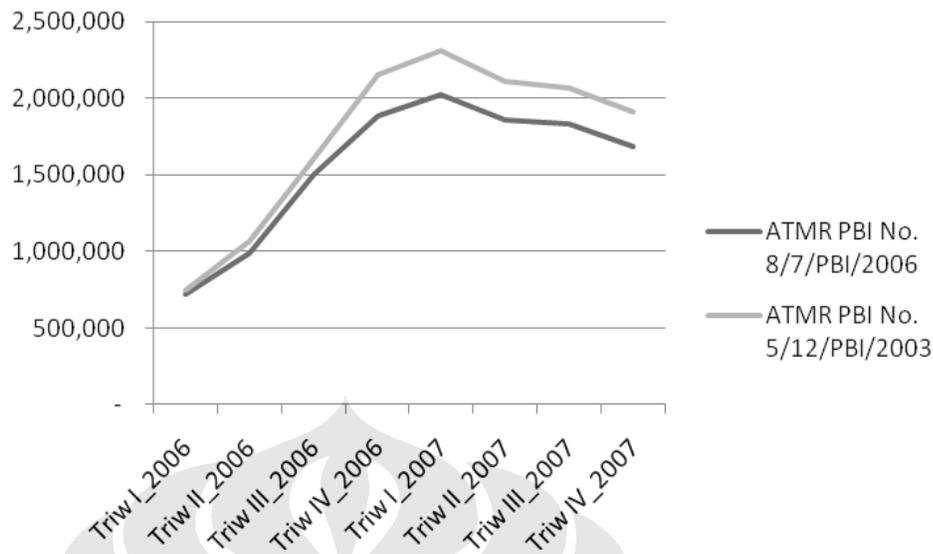
Tabel 4.8 Perhitungan ATMR BSMI menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

(dalam jutaan rupiah)

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)				
ATMR	Tahun 2006			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	746,082	1,067,539	1,607,541	2,160,223
PBI No. 8/7/PBI/2006	724,355	994,998	1,504,723	1,888,864
ATMR	Tahun 2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	2,312,721	2,115,349	2,068,103	1,910,738
PBI No. 8/7/PBI/2006	2,027,659	1,863,346	1,832,239	1,688,829

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa hasil perhitungan ATMR menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 lebih besar dari pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bobot risiko, bobot risiko untuk sektor properti di PBI No. 5/12/PBI/2003 sebesar 50% sedangkan di PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya sebesar 35%. Bobot risiko untuk sektor KUK di dalam PBI No. 5/12/PBI/2003 sebesar 100% sedangkan di PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya sebesar 85%. Berikut disajikan grafik untuk melihat perbedaan hasil lebih jelas.



Grafik 4.1 ATMR BSMI menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari grafik 4.1 diketahui bahwa kurva perhitungan ATMR pembiayaan menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 selalu berada di atas kurva perhitungan ATMR pembiayaan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan *capital charge* menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 lebih besar daripada perhitungan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006.

4.2.1.3 Perhitungan KPMM

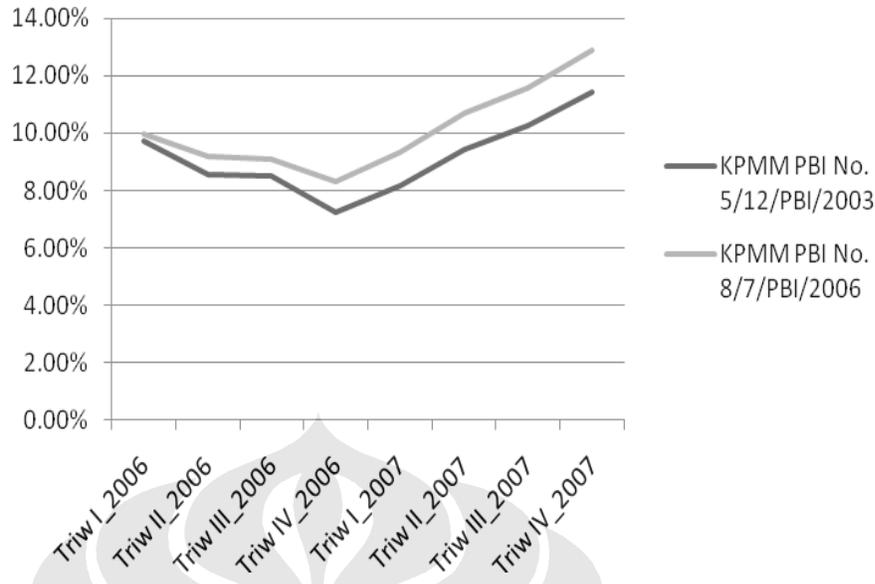
Perhitungan KPMM merupakan pembagian antara pembilang yang terdiri dari modal yang dikurang penyertaan dengan pembaginya yaitu ATMR pembiayaan. Dikarenakan BSMI tidak mempunyai penyertaan, maka rumus perhitungan KPMM di BSMI menjadi modal dibagi dengan ATMR pembiayaan. Berikut disajikan tabel perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006.

Tabel 4.9 Perhitungan Rasio KPMM BSMI menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)				
K P M M	Tahun 2006			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	9.70%	8.58%	8.49%	7.26%
PBI No. 8/7/PBI/2006	9.99%	9.20%	9.10%	8.30%
Tahun 2007				
K P M M	Tahun 2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	8.17%	9.45%	10.26%	11.41%
PBI No. 8/7/PBI/2006	9.32%	10.72%	11.58%	12.91%

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 akan menghasilkan rasio yang lebih rendah daripada perhitungan KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006. Diketahui juga bahwa pada triwulan keempat tahun 2006 perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 bahkan berada di bawah ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (8%), yaitu sebesar 7,26%. Berikut disajikan grafik perhitungan KPMM agar terlihat lebih jelas posisi KPMM hasil kedua perhitungan PBI tersebut.



Grafik 4.2 Perhitungan Rasio KPM BSMI menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari grafik 4.2 diketahui bahwa kurva rasio KPM hasil perhitungan menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 selalu berada di bawah kurva rasio KPM hasil perhitungan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rasio KPM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 lebih rendah dibandingkan dengan hasil perhitungan rasio KPM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006.

4.2.2 Bank Jasa Jakarta

Pada sub-bab berikut akan dilakukan perhitungan permodalan, ATMR dan KPM pada Bank Jasa Jakarta.

4.2.2.1 Perhitungan Permodalan

Permodalan Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 telah tersedia. Data tersebut digunakan kembali untuk menghitung modal menurut pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006. Berikut hasil yang didapatkan.

Tabel 4.10 Perhitungan Modal Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

(dalam jutaan rupiah)

Modal	Bank Jasa Jakarta			
	Tahun 2006			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	321,421	326,604	330,464	340,227
PBI No. 8/7/PBI/2006	321,421	326,604	330,464	340,227
Modal	Tahun 2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
	PBI No. 5/12/PBI/2003	371,276	379,831	389,294
PBI No. 8/7/PBI/2006	371,276	379,831	389,294	394,741

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa hasil perhitungan modal Bank Jasa Jakarta menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 dan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 menghasilkan nilai yang sama.

4.2.2.2 Perhitungan ATMR

ATMR kredit Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 telah tersedia. Data tersebut digunakan kembali untuk menghitung ATMR kredit menurut pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006. Berikut hasil yang didapatkan.

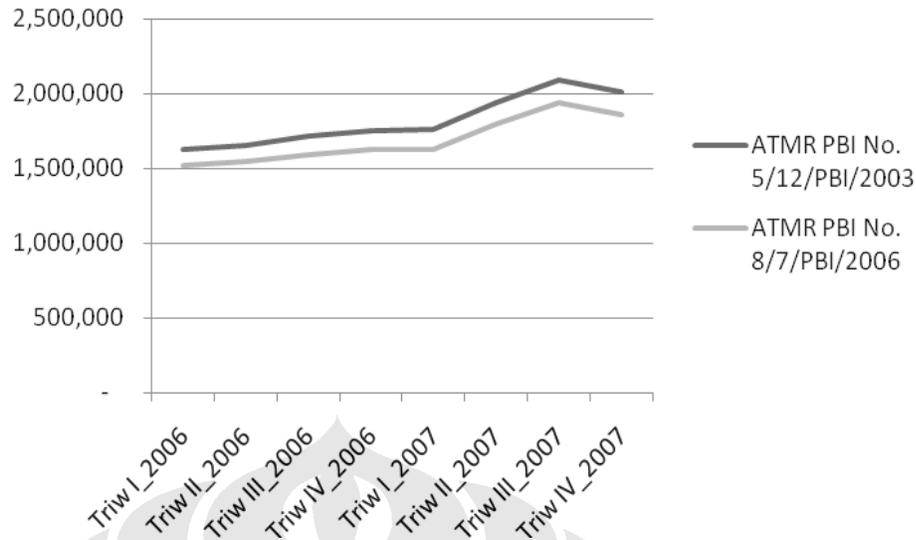
Tabel 4.11 Perhitungan ATMR Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

(dalam jutaan rupiah)

ATMR	Bank Jasa Jakarta			
	Tahun 2006			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	1,622,784	1,652,525	1,708,952	1,746,383
PBI No. 8/7/PBI/2006	1,522,288	1,548,938	1,597,806	1,624,982
ATMR	Tahun 2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
	PBI No. 5/12/PBI/2003	1,754,841	1,941,449	2,090,863
PBI No. 8/7/PBI/2006	1,625,587	1,797,154	1,940,219	1,860,650

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa ATMR dengan perhitungan PBI No. 5/12/PBI/2003 menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan perhitungan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan nilai eksposur yang sama. Hal ini disebabkan perbedaan bobot risiko. Bobot risiko untuk sektor properti dalam PBI 5/12/PBI/2003 sebesar 50% sedangkan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya 35%. Bobot risiko untuk sektor KUK di PBI No. 5/12/PBI/2003 sebesar 100% sedangkan pada PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya sebesar 85%. Perbedaan bobot risiko inilah yang menyebabkan perbedaan hasil perhitungan diantara kedua PBI tersebut. Berikut disajikan grafik hasil perhitungan ATMR kedua PBI.



Grafik 4.3 Hasil perhitungan ATMR Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari grafik 4.3 dapat diketahui posisi kurva hasil perhitungan ATMR menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 selalu berada di atas kurva hasil perhitungan ATMR menurut PBI No. 8/7/PBI/2006. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan ATMR menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 lebih besar daripada hasil perhitungan ATMR menurut PBI No. 8/7/PBI/2006, sekaligus menunjukkan bahwa *capital charge* yang dihasilkan oleh perhitungan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 lebih rendah daripada perhitungan menurut PBI No. 5/12/PBI/2003.

4.2.2.3 Perhitungan KPMM

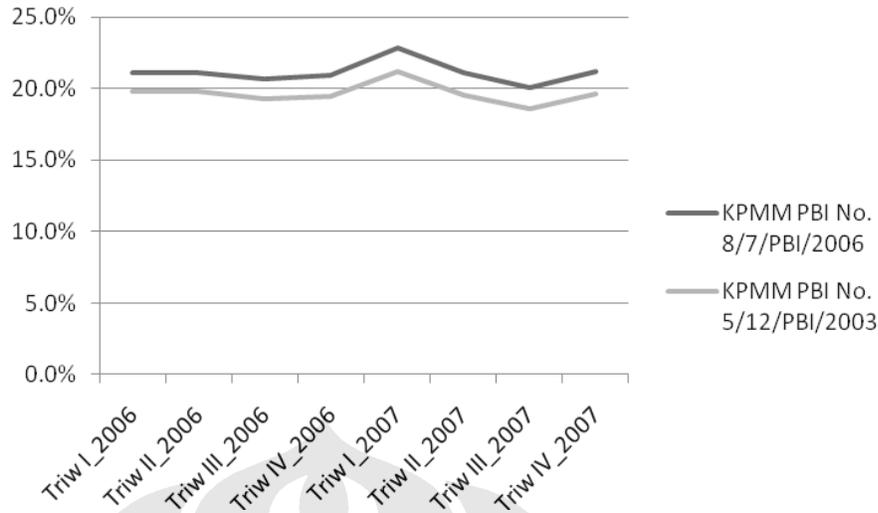
Perhitungan KPMM merupakan pembagian antara modal yang dikurang penyertaan dengan ATMR. Dikarenakan Bank Jasa Jakarta tidak mempunyai penyertaan, maka rumus perhitungan KPMM pada kasus Bank Jasa Jakarta menjadi modal dibagi dengan ATMR. Berikut disajikan tabel perhitungan KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006.

Tabel 4.12 Perhitungan Rasio KPMM Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

Bank Jasa Jakarta				
K P M M	Tahun 2006			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	19.8%	19.8%	19.3%	19.5%
PBI No. 8/7/PBI/2006	21.1%	21.1%	20.7%	20.9%
Tahun 2007				
K P M M	Tahun 2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 5/12/PBI/2003	21.2%	19.6%	18.6%	19.6%
PBI No. 8/7/PBI/2006	22.8%	21.1%	20.1%	21.2%

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa perhitungan rasio KPMM Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 menghasilkan rasio KPMM yang lebih besar daripada perhitungan rasio KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003. Hasil perhitungan rasio KPMM dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 berada enam perseratus sampai dengan delapan perseratus diatas hasil perhitungan menurut PBI No. 5/12/PBI/2003. Berikut disajikan grafik hasil perhitungan rasio KPMM menurut kedua PBI tersebut.



Grafik 4.4 Hasil perhitungan rasio KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari grafik 4.4 terlihat bahwa kurva hasil perhitungan rasio KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 berada di atas kurva hasil perhitungan rasio KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003. Hal ini menunjukkan hasil perhitungan rasio KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 lebih tinggi daripada hasil perhitungan rasio KPMM menurut PBI No. 5/12/PBI/2003.

4.3 Uji Hipotesis

Setelah melakukan perhitungan modal, ATMR dan KPMM maka dilanjutkan dengan menguji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji dua sampel yang independen dengan bantuan program SPSS versi 15. Berikut hipotesis yang diajukan:

Hipotesis Pertama (Bank Syariah Mega Indonesia):

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

H_1 : Terdapat perbedaan Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Hipotesis Kedua (Bank Jasa Jakarta):

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

H_1 : Terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Metode perhitungan menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 merupakan pendekatan metode 1 (satu) dan perhitungan PBI No. 5/12/PBI/2003 merupakan pendekatan metode 2 (dua). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai uji hipotesis masing-masing bank dan hasil pengujiannya.

4.3.1 Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI)

Hipotesis yang diajukan pada Bank Syariah Mega Indonesia ialah hipotesis yang pertama, yaitu:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Syariah Mega Indonesia antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

H_1 : Terdapat perbedaan Rasio KPPM Bank Syariah Mega Indonesia antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Data yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis ini merupakan data hasil perhitungan Rasio KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dan PBI No. 5/12/PBI/2003. Berikut disajikan datanya.

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Rasio KPMM BSMI menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dan PBI No. 5/12/PBI/2003.

No	Metode 1	Metode 2
	PBI No. 8/7/PBI/2006	PBI No. 5/12/PBI/2003
1	0.0999	0.0970
2	0.0920	0.0858
3	0.0910	0.0849
4	0.0830	0.0726
5	0.0932	0.0817
6	0.1072	0.0945
7	0.1158	0.1026
8	0.1291	0.1141

Sumber : Hasil Perhitungan

Data tersebut kemudian di-*input* ke dalam SPSS versi 15 untuk diolah. Dari analisis *compare means independent samples t-test* didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Group Statistics

	PBI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KPMM	1	8	.1014	.01518	.00537
	2	8	.0917	.01311	.00463

Rasio KPMM menurut metode 1 (PBI No. 8/7/PBI/2006) dengan jumlah data yang diolah sebanyak delapan data (N=8), mean (0,1014) dan standar deviasi (0.01518). Sedangkan perhitungan rasio KPMM menurut metode 2 (PBI No. 5/12/PBI/2003) dengan jumlah data yang diolah sebanyak delapan data (N=8), mean (0.0917), standar deviasi (0.01311). Dari data yang ada terlihat bahwa perhitungan dengan metode 1 menghasilkan mean lebih besar daripada perhitungan dengan metode 2, ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio KPMM dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 lebih besar daripada perhitungan dengan

PBI No. 5/12/PBI/2003. Dari hasil uji melalui program SPSS versi 15 didapatkan nilai t hitung sama dengan 1,375, derajat bebas 14 dan α sama dengan 5 % ($\alpha=5\%$). Dari tabel nilai dalam distribusi t untuk uji dua pihak (*two tail test*) dengan $\alpha=5\%$ dan derajat bebas 14 maka t tabel sama dengan 2,145. Oleh karena t hitung (1,375) < t tabel (2,145) dengan $\alpha=5\%$ maka, terima H_0 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM Bank Mega Syariah Indonesia antara PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan tingkat keyakinan 95%. Secara statistik rata-rata mean hasil perhitungan rasio KPMM antara metode PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan metode PBI No. 5/12/PBI/2003 tidak berbeda.

4.3.2 Bank Jasa Jakarta

Hipotesis yang diajukan pada Bank Jasa Jakarta ialah hipotesis yang kedua, yaitu:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Rasio KPMM Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

H_1 : Terdapat perbedaan Rasio KPMM Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Data yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis ini merupakan data hasil perhitungan Rasio KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dan PBI No. 5/12/PBI/2003. Berikut disajikan data hasil perhitungan Rasio KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Rasio KPMM Bank Jasa Jakarta menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dan PBI No. 5/12/PBI/2003

No	Metode 1	Metode 2
	PBI No. 8/7/PBI/2006	PBI No. 5/12/PBI/2003
1	0.2111	0.1981
2	0.2109	0.1976
3	0.2068	0.1934
4	0.2094	0.1948

Tabel 4.14 (Lanjutan)

5	0.2284	0.2116
6	0.2114	0.1956
7	0.2006	0.1862
8	0.2122	0.1964

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari analisis *compare means independent samples t-test* didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Group Statistics

	PBI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KPM	1	8	.2114	.00785	.00278
	2	8	.1967	.00708	.00250

Rasio KPM menurut metode 1 (PBI No. 8/7/PBI/2006) dengan jumlah data yang diolah sebanyak delapan data ($N=8$), mean (0,2114) dan standar deviasi (0.0785). Sedangkan perhitungan rasio KPM menurut metode 2 (PBI No. 5/12/PBI/2003) dengan jumlah data yang diolah sebanyak delapan data ($N=8$), mean (0.1967), standar deviasi (0.0708). Dari data yang ada dapat diketahui bahwa perhitungan dengan metode 1 menghasilkan mean lebih besar daripada perhitungan dengan metode 2. Dari hasil uji melalui program SPSS versi 15 didapatkan nilai t hitung sama dengan 3,916, derajat bebas 14 dan *alpha* sama dengan 5 % ($\alpha=5\%$). Dari tabel nilai dalam distribusi t untuk uji dua pihak (*two tail test*) dengan $\alpha=5\%$ dan derajat bebas 14 maka t tabel sama dengan 2,145. Oleh karena t hitung ($3,916 > 2,145$) dengan $\alpha=5\%$ maka tolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPM Bank Jasa Jakarta antara PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan tingkat keyakinan 95%. Perhitungan dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 menghasilkan rasio KPM yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan PBI No. 5/12/PBI/2003.

4.4 Solusi meningkatkan KPMM Bank Syariah Mega Indonesia

Dari hasil perhitungan besaran KPMM akan diketahui apakah KPMM suatu bank telah mencapai minimum 8% atau bahkan telah melebihinya. Selanjutnya dengan besaran angka KPMM ini, manajemen bank dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasional bank di masa mendatang. Untuk memudahkan pembuatan skenario peningkatan KPMM, maka diambil penetapan dasar pijakan nominal rasio KPMM, komponen pada aktiva neraca dan komponen pada laporan kualitas aktiva produktif pada triwulan keempat tahun 2007.

Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia pada triwulan keempat tahun 2007 sebesar 12,91%. Dilihat dari aturan rasio minimum KPMM yang harus dipenuhi oleh bank secara umum, Bank Syariah Mega Indonesia sudah melebihi batas minimum tersebut. Dari hasil kajian komparatif PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006 hanya ada beberapa bobot risiko saja yang berubah, berikut tabel perubahannya.

Tabel 4.15 Perubahan Bobot Risiko PBI No. 5/12/PBI/2003 dalam PBI No. 8/7/PBI/2006

No.	Komponen	Bobot Risiko	
		PBI No. 5/12/PBI/2003	PBI No. 8/7/PBI/2006
1.	Surat Berharga, piutang, pembiayaan/kredit, tagihan lain yang dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.	50%	20%
2.	Surat Berharga, piutang, pembiayaan/kredit, tagihan lain yang dijamin oleh pihak-pihak lainnya/swasta	100%	Sesuai rating yg dimiliki. bobot risiko antara 20% s.d. 150%

Tabel 4.15 (Lanjutan)

3.	Pembiayaan/kredit, piutang KPR/perumahan yang dijamin oleh hak tanggung jawab pihak pertama dengan tujuan untuk dihuni.	50%	35%
4.	Pembiayaan/kredit, piutang kepada usaha kecil.	100%	85%
5.	Pembiayaan/kredit, piutang kepada pegawai/ pensiunan.	100%	50%

Setelah mengetahui perubahan bobot risiko kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing komponen-komponen tersebut dan dikaitkan dengan PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 disebutkan bahwa BMPK kepada pihak terkait maksimum 10% dari modal bank, BMPK kepada pihak tidak terkait yang terdiri dari (1) penyediaan dana kepada satu peminjam maksimum 20% dari modal (2) penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam maksimum 25% dari modal. Penyediaan dana untuk BUMN maksimum 30% dari modal. Berikut disajikan aktiva neraca dan portofolio kredit Bank Syariah Mega Indonesia triwulan keempat tahun 2007.

Tabel 4.16 Aktiva Neraca dan Portofolio Pembiayaan Bank Syariah Mega Indonesia

No.	Komponen	Eksposur (dalam juta rupiah)	Persentase terhadap total aktiva (8)	Persentase terhadap total penyaluran dana (7)
1.	Surat Berharga	12.000	0.47%	
2.	KUK	1.384.118	54.03%	57.15%
3.	Properti	-	0%	0%
4.	Korporasi	488.941	19.09%	20.19%
5.	Penyaluran dana kpd pihak terkait	2.762		
6.	Penyaluran dana kpd pihak tidak terkait	2.419.223		
7.	Total Penyaluran Dana	2.561.804		
8.	Total Aktiva	2.421.985		

Sumber : Laporan publikasi triwulanan BSMI (diolah)

Dari tabel 4.16 pada komponen surat berharga hanya 0.4% dari total aktiva. Surat berharga ini merupakan surat berharga pada PT Jasa Marga Persero yang mempunyai rating idA+ menurut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat idA+ merupakan peringkat minimal yang setara dengan peringkat BBB- berdasarkan perusahaan pemeringkat *Standars & Poors (S&P)*. Dalam perhitungan ATMR, surat berharga yang dijamin oleh PT Jasa Marga mempunyai bobot risiko sebesar 100%. Untuk dapat meraih insentif atas penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006, manajemen BSMI dapat mempertimbangkan untuk pengalihan surat berharga ke perusahaan lain yang mempunyai rating lebih tinggi sehingga bobot risiko hanya sebesar 20% atau yang dijamin penuh oleh pemerintah pusat yang mempunyai bobot risiko sebesar 0% untuk menurunkan *capital charge* yang harus dipenuhi dalam komponen surat berharga ini.

Pada komponen KUK yang mempunyai persentase 54.03% terhadap total aktiva dan 57.15% terhadap total penyaluran dana, hal ini sudah sejalan dengan maksud dan tujuan penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 yaitu dalam rangka meningkatkan peran perbankan syariah untuk menggerakkan sektor riil dengan lebih memfokuskan kepada pemberian penyaluran dana kepada sektor usaha kecil serta mendukung pembiayaan pihak pegawai dan atau pensiunan. Yang perlu diwaspadai ialah kolektibilitas dalam komponen KUK, jangan sampai banyak masuk kedalam kategori kredit macet. Pada komponen korporasi yang mempunyai persentase 19.09% dari total aktiva dan 20.19% dari total penyaluran dana. Pada komponen korporasi ini BSMI masih menanggung beban risiko sebesar 100% karena semua nasabah korporasi belum mempunyai rating atau *unrated*. Untuk menurunkan bobot risiko nasabah korporasi menjadi 50% perusahaan harus mempunyai rating A+ s.d. A- dan pengurangan bobot risiko sampai dengan 20% para nasabah korporasi harus mempunyai rating AAA s.d. AA-. Untuk melihat perubahan dampak perubahan bobot risiko KUK dan korporasi terhadap KPMM, berikut disajikan tabel perubahannya dengan skenario 1 (satu) yaitu bobot risiko untuk surat berharga 50% dan bobot risiko korporasi sebesar 50%. Skenario 2 (dua) yaitu bobot risiko surat berharga 20% dan bobot risiko korporasi sebesar 20%.

Tabel 4.17 Dampak Perubahan Bobot Risiko Surat Berharga dan Korporasi terhadap KPMM

Komponen	Kondisi Sekarang (Triw IV)		Skenario 1 (satu)		Skenario 2 (dua)	
	Bobot Risiko	KPMM	Bobot Risiko	KPMM	Bobot Risiko	KPMM
Surat Berharga	100%	12,91%	50%	14,94%	20%	16,65%
Korporasi	100%		50%		20%	

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa dengan melaksanakan skenario 1 (satu) yaitu pengalihan kepemilikan surat berharga ke perusahaan yang mempunyai rating A+ s.d. A- dengan bobot risiko 50% dan penyaluran dana ke korporasi yang mempunyai A+ s.d. A- dengan bobot risiko 50% maka KPMM akan naik dari 12,91% menjadi 14,49%. Dengan melaksanakan skenario 2 (dua) yaitu dengan pengalihan kepemilikan surat berharga ke perusahaan yang mempunyai rating AAA s.d. AA- dengan bobot risiko 20% dan penyaluran dana kepada sektor korporasi yang mempunyai rating AAA s.d. AA- dengan bobot risiko 20% maka KPMM akan meningkat dari 12,91% menjadi 16,65%.

4.5 Penerapan Prinsip Keadilan dalam PBI No. 8/7/PBI/2006

Bank Indonesia dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dalam penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 diharapkan dapat menerapkan prinsip keadilan. Dari pembahasan pada kajian komparatif ditemukan bahwa PBI No. 8/7/PBI/2006 telah memberikan kesempatan bagi pengguna untuk dapat menikmati insentif atas terbitnya peraturan tersebut, yaitu dalam hal peningkatan rasio KPMM. Peningkatan rasio KPMM lebih disebabkan karena faktor pengurangan bobot risiko dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 dibandingkan dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Prinsip keadilan juga dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio KPMM yang didapatkan. Rasio rata-rata KPMM dengan perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 selalu berada di atas rasio rata-rata perhitungan KPMM dengan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 baik pada Bank Syariah Mega Indonesia maupun pada Bank Jasa Jakarta. Sehingga dugaan bahwa PBI No. 8/7/PBI/2006 tidak menerapkan prinsip keadilan terhadap Bank Syariah Mega Indonesia dalam perhitungan rasio KPMM-nya tidak benar. PBI No. 8/7/PBI/2006 sudah selaras dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

dan sudah selaras juga dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi yang berbunyi: *”Demi Allah, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri tentu aku akan potong tangannya.”* Ayat di atas dan Hadits ini mengisyaratkan bahwa BI sebagai pembuat kebijakan tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan ketidakadilan terhadap pengguna peraturan dalam hal ini Bank Syariah Mega Indonesia dibandingkan dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini membuktikan bahwa BI dalam pembuatan dan aplikasi PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan nilai-nilai keadilan dalam perhitungan rasio KPMM-nya.

